



PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA

Gina Fikria Sofha, Inda Nabila, Maudi ZahranY Yusriyyah, Nurul Annisa
Universitas Siliwangi

Email: ginasofha29@gmail.com , indanabila6@gmail.com , maudizahrani30@gmail.com,
denurul011@gmail.com

Abstrak:

Krisis karakter Indonesia mengancam nilai karakter bangsa yang bermartabat. Untuk menyelesaikan masalah karakter bangsa Indonesia yang telah merosot, terutama di era globalisasi saat ini, diperlukan penanganan. Tujuannya adalah untuk membentuk karakter bangsa melalui pendidikan kewarganegaraan (PKn). Tujuannya adalah untuk membentuk sifat bangsa Indonesia. Salah satu cara yang efektif untuk membangun karakter yang baik untuk generasi muda adalah pendidikan. Ditunjukkan bahwa pendidikan karakter berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan, memperbaiki, dan mengatur. Pendidikan karakter juga berfungsi untuk menumbuhkan potensi, kebiasaan, dan perilaku, menanamkan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan, dan menciptakan kemampuan dan lingkungan sekolah. Pendidikan kewarganegaraan memiliki fungsi diantaranya membangun keterampilan partisipatif yang menjadikan warga negara Indonesia yang aktif, kritis, cerdas, dan demokratis, serta membangun kebudayaan demokrasi yang berkeadaban. Berdasarkan penelitian saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya keterlibatan semua pihak dalam memperhatikan dan ikut serta dalam membangun karakter siswa sebagai generasi penerus masa depan bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganeraan, Karakter Bangsa, Pendidikan

Abstract:

The current character crisis in Indonesia threatens the dignity of the nation's character values. To address the decline of Indonesian national character, especially in the current era of globalization, appropriate measures are needed. One of the efforts that can be undertaken is through civic education (PKn), which aims to shape a good Indonesian national character. Education is one of the effective ways to develop good character in the younger generation. It has been proven that character education serves as a means to develop, improve, and regulate individual character. Character education also functions to nurture potential, form positive habits and behaviors, instill a sense of responsibility and leadership, and create a conducive school environment. Civic education plays an important role in building participatory skills that can make Indonesian citizens active, critical, intelligent, and democratic. Furthermore, this education also contributes to the development

of a democratic culture with moral values. Based on research, it is suggested that the involvement of all parties is necessary to pay attention to and actively participate in building the character of students as the future generation of Indonesia.

Keywords: Civic Education, National Character, Education

PENDAHULUAN

Karakter bangsa Indonesia sedang mengalami penurunan yang nyata, yang terlihat dari kurangnya moralitas dan etika pada generasi muda. Identitas bangsa Indonesia tampaknya telah hilang, dengan banyak siswa yang lebih mencintai budaya asing daripada budaya domestik mereka sendiri. Mereka juga menganggap perilaku negatif yang berasal dari Barat, seperti kekerasan, tawuran antar siswa, dan pelecehan, sebagai sesuatu yang keren.

Perkembangan teknologi, termasuk penggunaan smartphone, semakin memudahkan akses terhadap hal-hal yang dapat berdampak baik atau buruk. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai dampak kemajuan teknologi telah menyebabkan penyalahgunaan teknologi. Salah satu cara yang efektif untuk membangun karakter yang baik pada generasi muda, khususnya siswa, adalah melalui pendidikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003.

Undang-undang tersebut memberikan prioritas yang besar pada pembentukan karakter siswa. Pengembangan karakter dianggap sebagai jalan utama dalam pembangunan nasional, dan diharapkan dapat

berdampak positif pada perkembangan karakter tersebut. Hal ini tercermin dalam misi pembangunan nasional, yang menjadikan pendidikan karakter sebagai prioritas utama dalam mencapai visi tersebut.

Dengan adanya pendidikan karakter, seseorang dapat menjadi cerdas dalam berpikir dan mengontrol emosinya. Kemampuan untuk mengelola emosi dengan cerdas sangat membantu dalam mempersiapkan siswa menghadapi kehidupan. Dengan kecerdasan emosional, seseorang dapat menghadapi berbagai macam rintangan, termasuk rintangan dalam mencapai kesuksesan akademik (Meilan Siadari, R., 2018).

Selain itu, warga negara yang tinggal di negara ini memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap negara. Hal ini sesuai dengan konsep warga negara yang cerdas dan baik, yang dapat diterapkan di negara lain. Seperti yang dijelaskan oleh Tuhuteru, L. (2017), pendidikan kewarganegaraan adalah pelajaran yang berfokus pada pembentukan individu yang beragam, termasuk aspek agama, sosial budaya, bahasa, usia, dan suku bangsa, untuk membentuk masyarakat yang cerdas, terampil, kreatif, dan memiliki karakter yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan akhir dari pendidikan kewarganegaraan adalah menanamkan moralitas yang dapat membentuk moral yang luhur dalam masyarakat. Tujuan akhir dari pendidikan kewarganegaraan adalah mengajarkan masyarakat bagaimana bertindak secara kritis dan kreatif. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya diajarkan di kelas, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa, dengan mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

METODE

Bahan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan. Tujuan dari kajian pustaka ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang peran Pendidikan kewarganegaraan dalam pembangunan karakter bangsa. Kami merujuk pada sumber-sumber teoritis dan empiris yang relevan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsep-konsep penting yang berkaitan dengan

pendidikan kewarganegaraan dalam konteks karakter bangsa.

Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Sehingga dengan menggunakan metode penelitian ini penulis dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang hendak

diteliti.

1. Sumber Data

/1Kami mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka, termasuk jurnal ilmiah, buku teks, dan publikasi terkait lainnya. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian kami yaitu mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam konteks karakter bangsa.

2. Metode Analisis

/1Kami menggunakan pendekatan analisis kualitatif dalam mengkaji sumber-sumber pustaka yang telah kami pilih. Kami melakukan analisis teks dengan memperhatikan konsep-konsep utama yang berkaitan dengan Pendidikan kewarganegaraan.

3. Subjek Penelitian

/1Subjek penelitian dalam kajian pustaka ini adalah literatur ilmiah yang berkaitan dengan Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks karakter bangsa.

4. Proses Analisis

/1Proses analisis dimulai dengan membaca secara menyeluruh dan menyimak sumber-sumber pustaka yang dipilih. Kami melakukan pencatatan dan merangkum ide-ide utama, temuan, dan pendekatan yang diungkapkan dalam literatur tersebut.

5. Validitas dan Keandalan

/1Untuk memastikan validitas dan keandalan kajian pustaka, kami melakukan seleksi terhadap sumber-sumber pustaka yang relevan dan berkualitas. Kami juga mengutamakan sumber-sumber yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah terpercaya dan ditinjau oleh para ahli dalam bidangnya.

Berdasarkan bahan dan metode yang telah di dapatkan, kami mampu memperoleh wawasan yang mendalam tentang peran Pendidikan kewarganegaraan dalam pembangunan karakter bangsa,.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembangunan Karakter Bangsa

1. Pengertian karakter bangsa

Karakter secara etimologis berasal dari bahasa Inggris "character" yang berarti watak atau sifat. Dalam hal ini, karakter ialah given atau sesuatu yang telah ada dari sananya.

Karakter adalah nilai-nilai yang khas, baik berupa watak, akhlak, maupun kepribadian seseorang yang terbentuk melalui proses internalisasi kebijakan yang diyakini dan digunakan sebagai pedoman dalam pandangan hidup, pemikiran, sikap, ucapan, dan perilaku sehari-hari. Seseorang yang memiliki karakter diartikan sebagai individu yang memiliki kepribadian, perilaku, sifat, tabiat, dan watak tertentu. Dalam pengertian ini, karakter dapat diidentifikasi dengan kepribadian atau akhlak. Kepribadian

adalah ciri, karakteristik, atau sifat unik seseorang yang berasal dari pengalaman yang diterima dari lingkungan, seperti keluarga saat masa kecil, dan sifat bawaan sejak lahir.

Namun, istilah "karakter" sebenarnya memiliki makna yang ambigu. Mounier

(1956) mengemukakan dua cara interpretasi tentang ambiguitas terminologi "karakter". Pertama, karakter bisa dilihat sebagai sekumpulan kondisi yang ada begitu saja atau kodrat dalam diri kita. Karakter seperti ini dianggap sebagai sesuatu yang sudah ada sejak awal. Kedua, karakter juga dapat dipahami sebagai tingkat kekuatan di mana seseorang mampu mengendalikan kondisi-kondisi tersebut. Mounier menyebut karakter seperti ini sebagai proses yang dikehendaki atau *willed*.

Karakter juga bisa disebut sebagai watak, yang merupakan kombinasi dari semua sifat-sifat manusia yang tetap dan membedakan satu orang dengan yang lainnya. Karakter atau watak terbentuk melalui perkembangan dasar yang dipengaruhi oleh pendidikan. Oleh karena itu, ada yang menyebutnya sebagai pendidikan karakter. Istilah "dasar" mengacu pada potensi dasar atau bakat yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Sedangkan "ajar" mencakup semua pengajaran dan pendidikan yang membentuk pribadi yang terlihat.

Menurut Ki Hadjar Dewantara (1977: 408), karakter dalam diri seseorang adalah keseimbangan yang tetap antara kehidupan batinnya dan segala tindakannya. Karakter seolah-olah menjadi dasar atau inti dalam hidupnya yang kemudian menghasilkan perilaku yang khas untuk setiap individu.

Karakter dapat dilihat dari tingkah laku saat berinteraksi dengan orang lain, yang memiliki makna psikologis dan etis. Secara psikologis, karakter mencerminkan sifat-sifat yang terlihat dan seolah-olah mewakili kepribadiannya. Secara etis, karakter berkaitan dengan nilai-nilai yang baik dan menunjukkan sifat-sifat yang dapat dipercaya. Seseorang yang memiliki karakter menunjukkan sifat memiliki pendirian teguh, baik, terpuji, dan dapat dipercaya. Memiliki karakter berarti memiliki prinsip-prinsip moral di mana tindakan dan perilakunya dapat dipertanggungjawabkan dan konsisten. Dalam Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa, karakter diartikan sebagai nilai-nilai positif yang dimiliki seseorang (memahami nilai-nilai kebaikan, ingin berbuat baik, menunjukkan perilaku yang baik, dan memiliki dampak positif pada lingkungan) yang tercermin dalam tindakan mereka. Karakter secara menyeluruh tercermin dari pemikiran, perasaan, aktivitas fisik, serta semangat dan cita-cita

seseorang atau sekelompok orang. Karakter merupakan identitas khas individu atau kelompok yang mencakup nilai-nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan.

Karakter bangsa adalah ciri khas dan sikap suatu bangsa yang tercermin dalam tingkah laku dan kepribadian warga negara. Sikap ini dapat dipengaruhi oleh faktor yang sudah ada sejak awal

(given) maupun usaha yang dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk kemajuan bangsa tersebut (willed). Oleh karena itu, karakter bangsa sangat bergantung pada keinginan politik pemerintah atau para pemimpin negara, karena karakter bangsa selain sudah ada sejak awal juga dapat dibangun sesuai dengan visi negara. Sejarah menunjukkan bahwa para pendiri negara telah meletakkan dasar dan pondasi yang menjadi karakter bangsa, yang penting untuk dikembangkan dan ditransformasikan agar dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia.

Karakter suatu bangsa merupakan aspek penting yang mempengaruhi perkembangan sosial-ekonomi bangsa tersebut. Kualitas karakter yang tinggi dari masyarakat akan menciptakan kualitas bangsa yang baik. Beberapa ahli meyakini bahwa pengembangan karakter terbaik dilakukan sejak usia dini. Menurut Kartadinata (2013),

karakter bangsa bukan hanya hasil dari karakter individu, tetapi juga harus tercermin dalam rasa kebangsaan yang kuat dalam konteks keberagaman budaya. Karakter bangsa melibatkan perekat budaya, yang harus diwujudkan dalam kesadaran budaya dan kecerdasan budaya setiap warga negara.

Dalam Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa, disebutkan bahwa karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif yang khas dan baik, yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, sikap, cita-cita, dan perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil dari pemikiran, perasaan, semangat, dan olahraga individu atau kelompok. Karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif bangsa yang khas dan baik, yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, sikap, cita-cita, dan perilaku berbangsa dan bernegara Indonesia, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih lanjut disebutkan bahwa untuk kemajuan Negara Republik Indonesia, diperlukan karakter yang kuat, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, toleran, gotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan

dan teknologi, berdasarkan Pancasila dan diperkuat oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karakter yang berlandaskan falsafah Pancasila berarti setiap aspek kehidupan harus mencerminkan kelima sila Pancasila secara utuh dan komprehensif, yaitu: 1) kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2) kemanusiaan yang adil dan beradab, 3) persatuan Indonesia, 4) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Pentingnya pembangun/1karakter bangsa

Membangun karakter bangsa merupakan suatu usaha untuk membentuk dan mengembangkan nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang positif pada individu-individu dalam suatu negara. Ini sangat penting dalam membangun masyarakat yang berkualitas, memiliki moralitas, integritas, dan kepedulian terhadap sesama. Membangun karakter bangsa membantu menjaga dan memperkuat identitas suatu negara. Nilai-nilai budaya, moral, dan etika yang baik akan menjadi dasar bagi setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki karakter yang baik, masyarakat akan lebih mudah bersatu, saling membantu, dan memiliki ikatan yang kuat.

Solidaritas ini sangat penting dalam menghadapi tantangan dan perubahan dalam masyarakat.

Pembangunan karakter bangsa juga bertujuan untuk mengembangkan kesadaran sosial pada individu. Ini mencakup kepedulian terhadap sesama, keadilan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Karakter yang baik merupakan salah satu kunci dalam membentuk pemimpin yang berkualitas. Pemimpin yang memiliki integritas, kejujuran, kepemimpinan yang adil, dan empati terhadap rakyatnya akan mampu membawa negara menuju kemajuan yang berkelanjutan.

Di era globalisasi ini, karakter bangsa menjadi dasar penting dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan dinamis. Masyarakat yang memiliki karakter yang kuat akan lebih mampu mengatasi berbagai perubahan dan tantangan global dengan bijaksana dan inovatif. Pembangunan karakter bangsa membantu menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, saling menghargai, dan didasarkan pada prinsip keadilan. Ini akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Pentingnya pembangunan karakter bangsa menjadikan nilai-nilai dan etika sebagai dasar dalam kehidupan

sehari-hari. Dengan individu yang memiliki karakter yang baik, diharapkan negara dapat mencapai kemajuan dalam segala aspek kehidupan dan mampu menghadapi perubahan dengan tegar.

B. Pendidikan kewarganegaraan

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan adalah proses pembentukan individu yang memiliki kualitas. Melalui proses alami dan sistematis tersebut, pendidikan diharapkan menjadi dasar untuk memahami esensi sejati kehidupan. Untuk mencapai harapan tersebut, pendidikan membutuhkan unsur yang penting, yaitu mata pelajaran. Mata pelajaran merupakan bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada siswa tentang berbagai ilmu pengetahuan, meningkatkan keterampilan, serta membentuk sikap baik sesuai dengan tujuan masing-masing mata pelajaran. Salah satu mata pelajaran yang termasuk dalam kurikulum pendidikan di Indonesia adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki asal-usul dari bahasa Latin "civicus" yang berarti warga negara pada zaman Yunani kuno. Pengertian civicus ini kemudian disepakati sebagai awal dari "civic education". Konsep civic education tersebut kemudian diadopsi di Indonesia sebagai pendidikan

kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang fokus pada pembentukan karakter sebagai warga negara. Tujuan pendidikan ini adalah menciptakan warga negara Indonesia yang memiliki keterampilan, kecerdasan, dan karakter yang sesuai dengan Pancasila dan konstitusi (BSNP, 2006: 108).

Meskipun demikian, tujuan pendidikan kewarganegaraan di setiap negara memiliki kesamaan, yaitu membentuk warga negara yang baik. Namun, konsep warga negara yang baik

dapat berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya, seperti halnya di Indonesia di mana hal tersebut dijelaskan sebelumnya.

Pendidikan Kewarganegaraan mencakup konsep dan informasi yang komprehensif tentang warga negara secara kritis dan bertanggung jawab, dengan landasan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan kewarganegaraan secara khusus berfokus pada pengembangan beberapa aspek penting dalam menjadi warga negara, yaitu pengembangan kompetensi kewarganegaraan (civic competence), akhlak warga negara (civic virtue), serta nilai-nilai dan keyakinan terhadap demokrasi (nilai dan keyakinan demokratis). Melalui semua elemen tersebut, pendidikan kewarganegaraan menjadi panduan dalam membentuk

karakter warga negara berkualitas yang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

2. Landasan pendidikan kewarganegaraan

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian dari pendidikan yang wajib, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi. Pasal 35 ayat (3) dalam undang-undang tersebut mewajibkan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan bagi mahasiswa. Pasal 35 ayat (3) menjelaskan bahwa mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk memberikan pendidikan tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini bertujuan untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta terhadap tanah air.

Peraturan tersebut sejalan dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 43/Dikti/Kep/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Kepribadian di Perguruan Tinggi. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa isi materi dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

terdiri dari filsafat Pancasila, identitas nasional, politik dan strategi, demokrasi Indonesia, hak asasi manusia dan prinsip the rule of law, hak dan kewajiban sebagai warga negara, geopolitik Indonesia, serta geostrategi Indonesia. Menurut Branson (1999: 4) Pendidikan Kewarganegaraan harus mencakup tiga komponen yaitu :

1) Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge)

Civic knowledge adalah kemampuan akademik yang berasal dari teori atau konsep politik, hukum, dan moral yang menjadi dasar dalam pengembangan kompetensi warga negara.

2) Keterampilan Kewarganegaraan (Civic Skill)

Warga negara Indonesia tidak hanya perlu memiliki pengetahuan yang cerdas, tetapi juga harus memiliki keterampilan yang baik. Mereka harus mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara. Kemampuan warga negara dalam mengaplikasikan pengetahuannya ditujukan untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Civic skill mencakup keterampilan berpartisipasi (partisipasi aktif) dan keterampilan intelektual (kemampuan berpikir kritis) dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara.

3) Watak Kewarganegaraan (Civic Dispotion)

Tidak hanya pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan, tetapi juga diperlukan adanya watak kewarganegaraan untuk membentuk warga negara Indonesia yang baik. Watak kewarganegaraan ini akan membedakan sikap warga negara Indonesia dalam melihat dan melakukan sesuatu. Watak ini juga memberikan pemahaman mengenai hal-hal yang pantas dan tidak pantas, baik dan buruk, serta tepat atau tidak tepat dalam berbagai situasi.

3. Fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan merupakan program studi yang terfokus pada bidang sosial dan kenegaraan. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam segi pribadi, sebagai anggota bangsa, dan sebagai warga negara. Menurut Somantri (2001: 166), fungsi pendidikan kewarganegaraan adalah upaya yang disadari oleh individu secara ilmiah dan psikologis untuk memfasilitasi pembelajaran peserta didik. Tujuan dari hal ini adalah agar terjadi internalisasi nilai-nilai moral Pancasila dan pengetahuan kewarganegaraan sejak dini pada warga negara Indonesia, serta untuk

mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui integritas dalam diri sendiri dan aktivitas sehari-hari di lingkungan sekitar.

Proses pembelajaran dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila serta pengetahuan tentang kehidupan sebagai warga negara. Hal ini penting sebagai dasar untuk mencapai kesuksesan dalam pendidikan nasional yang dapat diimplementasikan melalui kegiatan sehari-hari.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian integral dari kurikulum sekolah dan perguruan tinggi, serta merupakan disiplin ilmu dalam bidang ilmu sosial yang memiliki tujuan khusus, yaitu membentuk dan mengembangkan karakter peserta didik agar menjadi warga negara yang baik (good citizenship). Fokus utama pendidikan kewarganegaraan adalah pembinaan nilai-nilai, dengan mengajarkan dan mengembangkan moral dan norma kepada peserta didik, serta melatih mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berinteraksi dalam konteks bangsa dan negara. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga berperan sebagai sarana untuk mengembangkan dan memperkaya nilai-nilai yang berasal dari budaya bangsa Indonesia. Tujuan dari hal ini adalah agar

nilai-nilai luhur bangsa dapat diimplementasikan secara rasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan juga dapat diartikan sebagai usaha untuk memastikan bahwa warga negara memiliki kemampuan rasional dalam berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional. Menurut Winataputra (2007: 1.20), peningkatan partisipasi aktif dan bertanggung jawab warga negara membutuhkan pemahaman ilmu pengetahuan, keterampilan intelektual, serta keterampilan untuk berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, Branson (1999: 7)

berpendapat bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mendorong partisipasi dan tanggung jawab warga negara dalam kehidupan politik dan masyarakat, baik di tingkat lokal, negara, maupun nasional.

Tujuan civic education menurut DIRJEN DIKTI Nomor 43/Dikti/Kep/2006 tertuang dalam visi dan misi sebagai berikut : Visi Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seluruhnya. Misi Pendidikan

kewarganegaraan di perguruan tinggi ditujukan untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar konsisten dan mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa tanggung jawab.

C. Pendidikan kewarganegaraan pembangun karakter bangsa

Menurut Rosyada, dkk (2000:7), Pendidikan Kewarganegaraan dapat disamakan dengan Pendidikan Demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan individu sebagai warga negara yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan bertindak secara demokratis. Melalui berbagai kegiatan, tujuan pendidikan ini adalah menanamkan kesadaran akan pentingnya demokrasi sebagai bentuk kehidupan sosial yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Somantri menjelaskan beberapa ciri Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu: 1) PKn melibatkan seluruh kegiatan dan program di sekolah; 2) PKn mencakup berbagai kegiatan pengajaran yang dapat membantu individu hidup dan berperilaku secara lebih baik dalam masyarakat yang demokratis; dan 3) dalam konteks kewarganegaraan, PKn juga mencakup aspek pengalaman, kepentingan masyarakat, kondisi

pribadi, serta tujuan untuk hidup dalam bermasyarakat yang berbangsa.

Menurut Rosyada, dkk (2000:10), tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan meliputi: (1) Membentuk individu yang memiliki kemampuan partisipatif yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global;

(2) Menjadikan warga masyarakat yang baik dan mampu menjaga persatuan serta integrasi bangsa, dengan tujuan mewujudkan Indonesia yang kuat, sejahtera, dan demokratis; (3) Menghasilkan mahasiswa yang berpikiran komprehensif, analitis, kritis, dan bertindak secara demokratis; (4) Mengembangkan budaya demokrasi, termasuk kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, kemampuan pengambilan keputusan, serta kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan politik dan kemasyarakatan; (5) Membentuk mahasiswa agar menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab (good and responsible citizen) melalui penanaman nilai-nilai moral dan keterampilan sosial, sehingga mereka mampu memahami dan memecahkan persoalan-persoalan aktual dalam kewarganegaraan, seperti toleransi, menghargai perbedaan pendapat, bersikap empati, menghargai pluralitas, memiliki kesadaran hukum dan ketertiban sosial, menghormati hak asasi manusia, mengembangkan demokrasi

dalam berbagai aspek kehidupan, dan menghargai kearifan lokal (local wisdom).

Pendidikan memiliki peranan strategis dalam membentuk sistem nilai yang melekat pada individu, yang berkaitan dengan pengembangan gerak dan harga diri sebagai manusia sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat yang melingkupinya. Pendidikan senantiasa mengarahkan upaya dalam meningkatkan kesadaran dan martabat individu baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat dalam suatu negara. Pendidikan merupakan usaha yang disadari dan direncanakan untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri mereka, termasuk kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi diri mereka, masyarakat, bangsa, dan negara (Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003).

Dalam konteks ini, pendidikan yang memiliki fokus pada tujuan pembentukan karakter termasuk Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). PKn telah menjadi bagian integral dari instrumen pendidikan nasional untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada bangsa Indonesia. Melalui PKn, para peserta didik dipersiapkan untuk menjadi warga negara yang baik, berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan

bertanggung jawab. PKn berperan dalam menciptakan generasi yang memiliki karakter kuat dan rasa nasionalisme yang tinggi. Pendidikan karakter melibatkan penanaman nilai-nilai karakter kepada komunitas sekolah yang meliputi aspek pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan pola tindakan untuk menerapkan nilai-nilai tersebut. Pentingnya penanaman nilai-nilai karakter sejak usia dini adalah karena hal itu akan membentuk kebiasaan dan pola pikir yang terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari oleh individu, dan secara perlahan akan membentuk karakter yang baik pada peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Hal ini menjadi penting karena generasi muda rentan terpengaruh oleh arus globalisasi yang dapat mengarah pada sikap apatis yang akan berdampak pada identitas bangsa Indonesia (Rahmatiani, 2017).

Pentingnya kepribadian warga negara terletak pada kebijakan kewarganegaraan (civic virtues). Untuk mengembangkan kebijakan kewarganegaraan yang efektif, diperlukan pengembangan elemen-elemen yang meliputinya, yaitu: wawasan atau pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), sikap kewarganegaraan (civic disposition), keterampilan kewarganegaraan (civic commitment), dan kepercayaan diri kewarganegaraan (civic confidence). Secara keseluruhan, pengembangan kebijakan

kewarganegaraan sangat penting bagi setiap individu agar mampu berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam kehidupan kewarganegaraan (intelligent and responsible civic participation). Dalam konteks ini, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memainkan peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mempersiapkan warga negara agar memiliki komitmen yang kuat dan konsisten dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). PKn memberikan kontribusi dalam tanggung jawab pendidikan yang berfokus pada pembentukan individu melalui aspek agama, sosio-kultural, suku bangsa, bahasa, dengan tujuan menjadikan warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Dasim Budimansyah (dalam Sulistyarini, 2015: 6), pendidikan kewarganegaraan dapat diartikan sebagai kontribusi pendidikan dalam mengembangkan karakteristik yang mengidentifikasi seseorang sebagai warga negara. Dasim Budimansyah mengemukakan tiga peran PKn. Pertama, berdasarkan pendekatan psikopedagogi, PKn berfungsi sebagai program kurikuler dalam lembaga pendidikan formal (sekolah/ perguruan tinggi) maupun nonformal (di luar sekolah), yang bertujuan untuk membina

dan memberdayakan anak-anak dan pemuda sesuai dengan potensi mereka agar menjadi warga negara yang baik dan cerdas (*smart and good citizen*). Kedua, berdasarkan pendekatan sosio- kultural, PKn berperan sebagai gerakan sosio-kultural kewarganegaraan yang memungkinkan individu maupun kelompok mewujudkan diri sesuai dengan hak, kewajiban, dan konteks sosial-budayanya, melalui partisipasi aktif yang cerdas dan bertanggung jawab. Ketiga, berdasarkan pendekatan intervensi sosio-politik, PKn menjadi program pendidikan politik kebangsaan bagi para penyelenggara negara, anggota dan pimpinan organisasi sosial, serta organisasi politik, yang disajikan dalam berbagai bentuk pembinaan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan sikap kewarganegaraan yang baik (*civic disposition*).

Dari perspektif yuridis, pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi diwajibkan untuk menyertakan PKn dalam kurikulum dengan tujuan membentuk peserta didik menjadi individu yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. PKn memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan karakter bangsa, dan hal ini dapat diamati dari tiga aspek yang disampaikan oleh Winataputra (2001). Pertama, konten kurikulum atau isi kurikulum PKn, yang

ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 43/Dikti 2006. Beberapa pokok pembahasan dalam PKn meliputi Filsafat Pancasila, Identitas Nasional, Negara dan Konstitusi, Demokrasi Indonesia, Hak Asasi Manusia dan Rule of Law, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Geopolitik Indonesia, dan Geostrategi Indonesia.

Materi-materi tersebut menjadi dasar dalam pembangunan karakter warga negara yang pada akhirnya akan membentuk karakter bangsa secara keseluruhan.

Dalam menghadapi tuntutan dan perkembangan zaman, guru/dosen memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan materi- materi tersebut secara tepat dan relevan. Kedua, mata pelajaran PKn dalam proses pembelajarannya sebaiknya dipandang

dan diimplementasikan sebagai praktik demokrasi. Pendekatan yang disarankan dalam pembelajaran adalah pendekatan yang lebih berfokus pada pemikiran kritis dan solusi masalah. Ketiga, pada saat yang sama, lingkungan sekolah dan masyarakat secara luas harus

disiapkan sebagai ruang pembelajaran yang melibatkan "*spiral global classroom*" (Cogan,1999:7). Dalam hal ini, pembentukan karakter melalui pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan seperti sekolah atau perguruan tinggi, tetapi juga membutuhkan kesadaran bahwa pembangunan karakter merupakan tugas bersama semua pihak,

termasuk orang tua, anggota keluarga, dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kerja sama antara lembaga pendidikan, orang tua, dan lingkungan masyarakat sangatlah penting.

Sesuai dengan pandangan Purwito (1996), proses pendidikan yang sukses menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, pemerintah/lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pembentukan karakter juga merupakan tanggung jawab bersama dari lembaga pendidikan, orang tua, dan lingkungan sekitar. Jika salah satu dari pihak yang terlibat dalam pembentukan karakter tidak bekerja sama, maka tujuan untuk membentuk generasi muda yang memiliki karakter baik bagi bangsa tidak akan tercapai. Oleh karena itu, kerjasama di antara mereka sangat penting dalam mencapai tujuan tersebut..

KESIMPULAN

Secara prinsip, karakter yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia adalah karakter warga negara yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karakter ini meliputi keberagamaan, keadilan dalam beradab, tidak memecah belah persatuan bangsa Indonesia, semangat musyawarah, dan keadilan sosial. Nilai-nilai karakter yang sesuai dengan bangsa Indonesia telah tercakup dalam Pancasila. Namun, seiring perkembangan zaman,

karakter bangsa Indonesia yang beretika dan bermoral tampaknya perlahan-lahan menghilang. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan, yang merupakan salah satu instrumen pembentuk karakter bangsa, sangat penting dalam kurikulum pembelajaran. Pendidikan karakter harus dikembangkan sejak dini bagi peserta didik, mulai dari tingkat sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas warga negara melalui pendidikan. Peran pendidikan sangat penting dalam membangun karakter siswa. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi penopang dalam pembentukan karakter, yang berarti Pendidikan Kewarganegaraan membimbing peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik, terutama sebagai generasi penerus yang akan menghadapi perkembangan dan perubahan di era globalisasi. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan,

diharapkan peserta didik dapat mengembangkan sikap kesetiaan kepada tanah air dan dapat memberikan kontribusi secara tulus dan ikhlas untuk kemajuan negara. Tanggung jawab Pendidikan Kewarganegaraan dalam mencapai tujuan nasional dan mencerahkan kehidupan bangsa adalah untuk

membentuk generasi penerus yang bertanggung jawab, berakhlak mulia, bermoral, dan menjadi warga yang baik. Sebagai pelajaran pendidikan moral, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu solusi untuk mengarahkan perkembangan karakter peserta didik berdasarkan Pancasila. Seharusnya, Pendidikan Kewarganegaraan dilaksanakan secara terus menerus di setiap lembaga pendidikan dan relevan dengan situasi sosial saat ini.

BIBLIOGRAFI

adminpkn,+49.+499- 506+Dinie+Anggraeni+Dewi. (n.d.).

Humaeroh, S., & Dewi, A. (2021). Peran Pendidikan Kewarganegaraan di Era Globalisasi Dalam Pembentukan Karakter Siswa. *Journal on Education*, 03(03), 216–222

Setialaksana, N., & Gustaman, R. F (2018). Teori-Teori Dasar Pendidikan Kewarganegaraan. In N. Setialaksan, & R.

Gina Fikria Sofha, Inda Nabila, Maudi Zahrany Yusriyyah, Nurul Annisa

F. Gustaman, Teori-Teori Dasar Pendidikan Kewarganegaraan (pp. 1-15). Ciamis : Galuh Nurani Publishing House. Nurjanah, I. J., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D.

A. (n.d.). Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

Pnddkn-Karakter-Bngs-NS-Dharmawan-2014. (n.d.).

Putu Ari Astawa, O. I. (2017). IDENTITAS NASIONAL.

Yolandha, W., & Anggareni Dewi, D. (n.d.).

Pendidikan Kewarganegaraan

Konsolidasi Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0.

Z, M. F., D Pentingnya, D. A., Fikri Zulfikar, M., & Anggraeni Dewi, D. (2021). PENTINGNYA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MEMBANGUN KARAKTER BANGSA

(Vol. 6, Issue 1).

Zainudin Guru PPKn SMA, M. N. (n.d.). MEMBANGUN KARAKTER BANGSA INDONESIA BERDASARKAN NILAI- NILAI PANCASILA DAN KEARIFAN LOKAL..

Copyright holder:

Gina Fikria Sofha, Inda Nabila, Maudi Zahrany Yusriyyah, Nurul Annisa (2023)

First publication right:

[ADVANCES in Social Humanities Research](#)

This article is licensed under:

